

---

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PENDAPATAN  
DAERAH (BAPENDA) PROVINSI SULAWESI  
SELATAN (SULSEL)****Novita Ramdha Arfah\*<sup>1</sup>, Hariatih<sup>2</sup>, Fitri<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup> Prodi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesiae-mail: \*[novitaramdha9@gmail.com](mailto:novitaramdha9@gmail.com), [hariatih@stienobel-indonesia.ac.id](mailto:hariatih@stienobel-indonesia.ac.id),  
[fitriaza@nobel.ac.id](mailto:fitriaza@nobel.ac.id)**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kondisi kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun anggaran 2019-2021. (2) Mengetahui efektifitas dari kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun anggaran 2019-2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan sumber data berupa laporan keuangan tahun 2019-2021 dengan analisis data menggunakan 3 jenis rasio keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019-2021 belum efektif dan menunjukkan kemandirian dilihat dari pendapatan transfe yang semakin kecil. (2) Kemandirian bersifat delegative yaitu kemampuan keuangannya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan transfe, keefektifan bersifat tidak efektif disebabkan PAD tidak terealisasi sesuai dengan anggaran, dan pertumbuhan masih dalam kategori rendah karena dari 2019-2020 realisasi anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menurun dan meningkat kembali pada tahun 2021.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Pertumbuhan

**Abstract**

*This study aims to (1) determine the condition of financial performance at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of South Sulawesi Province (South Sulawesi) for the 2019-2021 fiscal year. (2) Knowing the effectiveness of financial performance at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of South Sulawesi Province (South Sulawesi) for the 2019-2021 fiscal year.*

*This research uses descriptive quantitative research methods, the type of data used is secondary data and data sources in the form of financial statements for 2019-2021 with data analysis using 3 types of regional financial ratios, namely regional financial independence ratio, effectiveness ratio and growth ratio.*

*The results showed that (1) the realization of the Regional Original Revenue (PAD) budget of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of South Sulawesi Province (South Sulawesi) for 2019-2021 has not been effective and shows independence as seen from the smaller transfe income. (2) Independence is delegative, namely its financial capacity is higher than transfe revenue, effectiveness is ineffective because PAD is not realized in accordance with the budget, and growth is still in the low category because from 2019-2020 the budget realization of the Regional Government of South Sulawesi Province (South Sulawesi) decreased and increased again in 2021.*

**Keywords:** Financial Performance, Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio and Growth Ratio.

**PENDAHULUAN**

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yakni instansi ataupun organisasi yang ada di bawah Pemda (Pemerintah Daerah) yang bertanggung jawab pada penerimaan pendapatan daerah dengan pengkoordinasian serta pemungutan pajak, dana perimbangan,

bagi hasil pajak, retribusi, serta lainnya. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) diketuai kepala dinas yang bertanggung jawab serta berada di bawah kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan daerah wewenang dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan secara mandiri. UU tersebut membuat Pemda memperoleh hak dalam menyusun, menjalankan, serta bertanggung jawab akan pelaksanaan APBD ke Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD). Tanggung jawab untuk pengelolaan keuangan daerah dituliskan pada Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan proses dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan Pemda. Proses tersebut dilakukan berlandaskan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang lebih lanjut dikelola sesuai Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang SAP dengan basis kas yang selanjutnya dikelola lagi sesuai Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang SAP dengan basis Accrual dalam lampiran I serta dengan basis Cash toward Accrual dalam lampiran II. Peraturan 2 Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang SAP telah secara penuh diterapkan setidaknya mulai di tahun 2015, kemudian terkait rencana tahapan pemberlakuan lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui penerbitan Permendagri No 64 Tahun 2013. Adapun tantangan yang diperoleh yakni apakah Pemda bisa mengaplikasikan akuntansi yang sejalan pada SAP sepenuhnya. Penyajian laporan keuangan dari tahun 2005 sejalan pada SAP bisa dilaksanakan melalui metode konversi ataupun memetakan beragam ketentuan Kemendagri No 29 Tahun 2002 ketentuan-ketentuan SAP (KSAP, 2006).

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang terjadi di pemerintah daerah. Oleh karena itu analisis kinerja laporan keuangan pada dasarnya merupakan Analisis Kinerja yang dapat dilakukan terhadap berbagai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah. Analisis kinerja juga merupakan salah satu gambaran pencapaian yang dapat dicapai dalam operasionalnya, baik dari aspek keuangan, pemasaran, penggalangan dan penyaluran dana, teknologi dan sumber daya manusia (Agusta, 2020).

Adapun diharapkan melalui pelaksanaan penelitian ini, mampu berkontribusi terutama untuk Bapenda Sulsel serta dengan melakukan secara umum untuk mewujudkan pendapatan serta belanja daerah dengan efisien serta efektif. Berpatokan pada latar belakang diatas, peneliti memperoleh ketertarikan dalam melaksanakan penelitian yang berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan (Sulsel)**”.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah kondisi kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun anggaran 2019-2021?
2. Bagaimanakah efektifitas dari kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun anggaran 2019-2021?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Agency Theory***

*Agency Theory* menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. *Agency Theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang

melakukan pekerjaan. *Agency Theory* yang memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agent bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri (*self-interest*) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship theory* (Inayati, 2014).

Teori keagenan adalah sebuah teori yang mengenai hubungan antara principal dengan agent. Dalam pemerintahan khususnya pemerintah daerah, yang dimaksud dengan principal adalah rakyat dalam hal ini diwakili oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah yang memberikan kepercayaan pengelolaan kekayaannya kepada agent, dalam hal ini gubernur/bupati /walikota untuk pemerintah daerah (Deswira, 2022).

Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai peranan penting untuk mengelola dana yang ada dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini dapat dipenuhi dengan melaksanakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat (Fathah, 2017).

### **Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan merupakan prestasi manajemen yang diukur dari sisi keuntungan yaitu memaksimalkan nilai keuangan. Hasil dari pengukuran kinerja keuangan sangat berarti bagi pihak yang berkepentingan agar bisa melihat keadaan perusahaan serta tingkat keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas operasional (Rahman, 2022).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber asli keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari kegiatan yang akan di capai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Ada beberapa tujuan penilaian kinerja perusahaan, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas.
2. Untuk mengetahui tingkat likuiditas.
3. Untuk menentukan tingkat solvabilitas.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan.

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Beberapa standar laporan keuangan yaitu :

### 1. Relevan.

Informasi dalam Laporan Keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan keuangan.

### 2. Andal

Laporan Keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi.

### 3. Dapat dibandingkan.

Laporan Keuangan dapat menjadi lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya.

### 4. Dapat dipahami.

Laporan Keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan, dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

## Rasio Keuangan

Rasio keuangan atau *financial ratio* merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan (Hidayah, 2019). Dengan penggunaan analisis rasio keuangan sudah banyak diterapkan pada lembaga korporasi yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas, hal ini dikarenakan:

- Terdapat keterbatasan penyajian laporan keuangan oleh lembaga pemerintah daerah yang sifat dan ruang lingkupnya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga korporasi komersial.
- Selama ini sebagian APBD masih disusun berdasarkan saldo anggaran inkremental, yaitu besaran masing-masing komponen pendapatan dan belanja dihitung dengan meningkatkan persentase tertentu dari pendapatan (biasanya berdasarkan tingkat inflasi).
- Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan komposisi atau struktur APBD.

Adapun jenis-jenis rasio keuangan daerah yaitu sebagai berikut.

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$RKKD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

ini: Pola hubungan tingkat kemandirian dapat digambarkan seperti tabel di bawah

Tabel 1  
Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konstruktif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: (Fathah, 2017)

## 2. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD (Rill)}}$$

Pola hubungan tingkat efektivitas dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2  
Kriteria Rasio Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber : (Fathah, 2017)

## 3. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0}$$

Diketahui :

t1 = tahun awal

t0 = tahun akhir

Pola hubungan tingkat pertumbuhan dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini

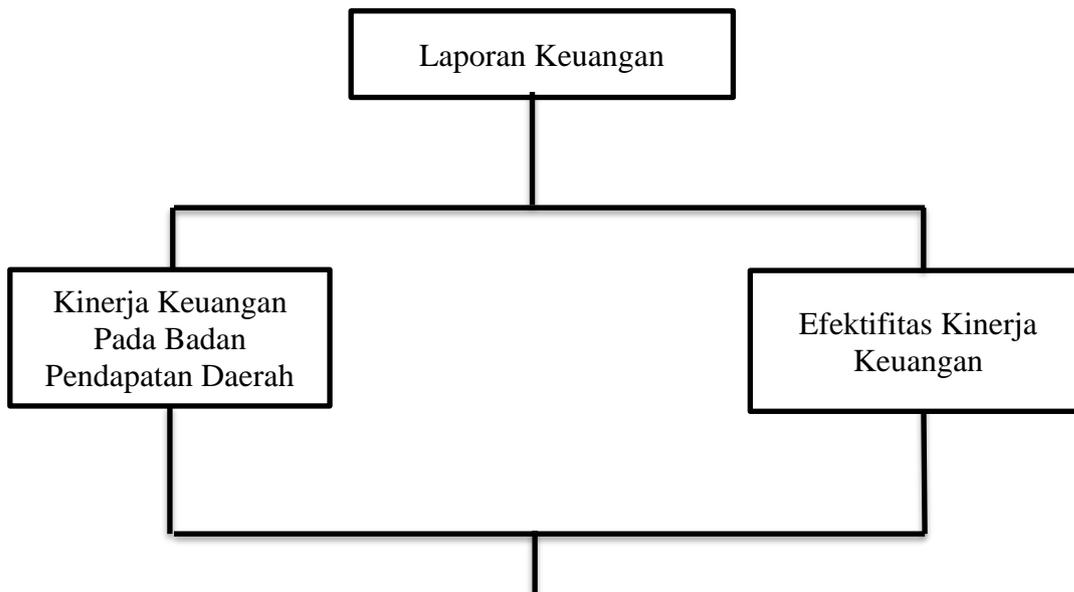
Tabel 3  
Kriteria Rasio Pertumbuhan

Kemampuan Keuangan	Pertmbuhan (%)
Rendah Sekali	0%-10%
Rendah	11%-20%
Sedang	21%-30%
Tinggi	Diatas 40%

Sumber : (Fathah, 2017)

**KERANGKA KONSEPTUAL**

**Gambar 1. Kerangka Pikir**



**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berlokasi di Jl. AP. Pettarani No.1 Kota Makassar dengan waktu pelaksanaan penelitian diperkirakan berlangsung selama satu bulan terhitung mulai bulan April – Mei 2023.

Dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan *web research*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu berbentuk kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Hariatih, 2022). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama. Selain itu, metode analisis yang digunakan yaitu 3 jenis rasio keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**HASIL**

**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

$$\begin{aligned}
 RKKD &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \\
 RKKD\ 2019 &= \frac{3.946.717.289.114,1}{5.341.000.000} = 73.895\% \\
 RKKD\ 2020 &= \frac{3.572.793.934.199,7}{5.194.000.000} = 68.787\% \\
 RKKD\ 2021 &= \frac{4.043.541.717.957,59}{2.097.000.000} = 192.825\%
 \end{aligned}$$

Untuk lebih jelasnya, maka disajikan grafik dibawah ini.

Gambar 2

Rasio Kemandirian Keuangan  
Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

**Rasio Efektivitas**

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD (Rill)}}$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2019} = \frac{3.946.717.289.114,1}{3.957.882.727.498} = 99,7\%$$

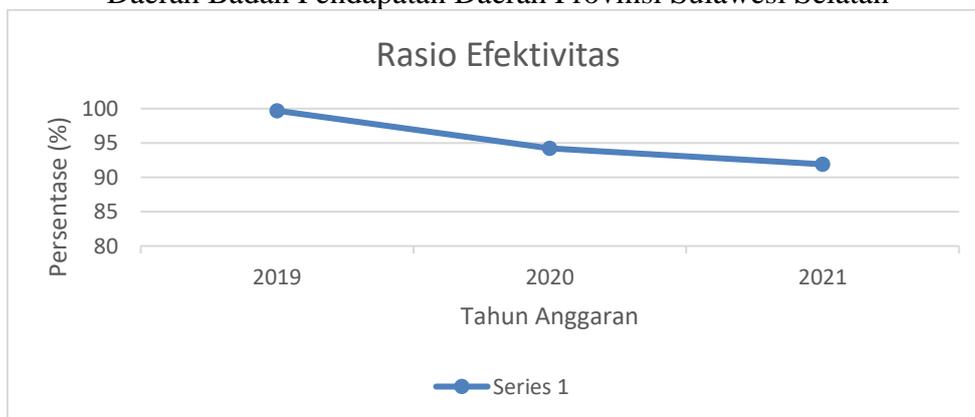
$$\text{Rasio Efektivitas 2020} = \frac{3.572.793.934.199,7}{3.794.061.876.073} = 94,2\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2021} = \frac{4.043.541.717.957,59}{4.394.315.199.232} = 92,02\%$$

Untuk lebih jelasnya, maka disajikan grafik dibawah ini.

Gambar 3

Rasio Efektivitas  
Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

**Rasio Pertumbuhan**

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan 2019} &= \frac{3.946.717.289.114,1 - 3.794.446.403.807,85}{3.794.446.403.807,85} \\ &= 4,01\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan 2020} &= \frac{3.572.793.934.199,77 - 3.946.717.289.114,19}{3.946.717.289.114,19} \\ &= -9,47\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan 2021} &= \frac{4.043.541.717.957,59 - 3.572.793.934.199,77}{3.572.793.934.199,77} \\ &= 13,17\% \end{aligned}$$

Untuk lebih jelasnya, maka disajikan grafik dibawah ini.

Gambar 2

**Rasio Pertumbuhan**

**Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**



Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

Berikut adalah rekapitulasi rasio keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2019-2021 :

Tabel 4

**Rekapitulasi Rasio Keuangan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019-2021**

Tahun	Rasio kemandirian		Rasio efektivitas			Rasio pertumbuhan		
	Hasil (%)	Kriteria	Hasil (%)	Kriteria	Hasil (%)	Kriteria		
2019	73.895 %	75% -	99,7 %	90% - 99%	Cukup Efektif	4,01%	0% - 10%	Rendah Sekali/Positif
2020	68.787 %	100 %	94,2 %			-9,47%	0% - 10%	Rendah Sekali/Negatif

2021	192.82 5%		Delegatif	91,02 %		Cukup Efektif	13,17%	11%- 20%	Rendah/Positif
------	--------------	--	-----------	------------	--	------------------	--------	-------------	----------------

Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan rasio maka diperoleh data pada tahun 2019 rasio kemandirian keuangan daerah berada pada posisi yang menunjukkan terjadinya fluktuasi yaitu penurunan dan kenaikan yang dapat dilihat mulai dari tahun 2019 hingga 2021 terjadi kenaikan secara drastis di tahun 2021 mengenai kemandirian keuangan daerah. Dilihat dari tabel kriteria rasio kemandirian keuangan daerah dalam tiga tahun anggaran tersebut masuk kedalam kategori delegatif yang berarti menunjukkan tingkat kemampuan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak dan retribusi yang merupakan sumber pendapatan dari daerah dengan minimumnya pendapatan eksternal.

Rasio kemandirian keuangan daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2019-2021 memperlihatkan besarnya nilai rasio kemandirian keuangan daerah selama tiga tahun anggaran. Artinya, menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang lain-lain. Maka dari itu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2019-2021 termasuk mandiri dikarenakan pendapatan transfer juga menunjukkan nilai yang relatif sangat kecil daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD), artinya ketergantungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah tergolong kecil.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas maka diperoleh data pada tahun 2019 berada pada posisi yang menunjukkan terjadinya penurunan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Dilihat dari tabel kriteria rasio efektivitas dari tiga tahun anggaran tersebut masuk dalam kategori cukup efektif karena masing-masing persentasenya dibawah 100% (<100%). Hal ini disebabkan karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak, retribusi dan lainnya lebih kecil dari yang dianggarkan. Maka, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) harus terus mengoptimalkan potensi pendapatannya yang telah ada agar pendapatan ditahun tahun berikutnya tidak lagi mengalami penurunan dan melampaui target anggaran yang telah ditentukan untuk mencapai kategori pendapatan yang efektif. Alternatif atau cara yang memungkinkan dapat meningkatkan potensi daerah yaitu dengan mencari sumber pendapatan selain yang telah ada.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan maka diperoleh data pada tahun 2019 berada pada posisi yang menunjukkan terjadinya fluktuasi yaitu penurunan dan kenaikan dari tahun ke tahun. Dilihat tabel kriteria dari rasio efektivitas pada tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif artinya Pemerintah Daerah dapat mempertahankan keberhasilannya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang menyebabkan pertumbuhan yang negative. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun 2019 lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2020. Maka, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) harus terus mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya dan berusaha untuk tidak bergantung pada bantuan eksternal atau bantuan pemerintah pusat agar daerah tersebut dapat mandiri mengelola daerahnya. Berbeda pada tahun 2021, mengalami kenaikan yang drastis melebihi pertumbuhan di tahun 2019. Pertumbuhan ditahun 2020 tergotolong positif,

artinya dari tahun sebelumnya pemerintah daerah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Namun berdasarkan tabel kriteria rasio pertumbuhan, kemampuan keuangan daerah dalam tiga tahun tersebut masih dalam kategori rendah.

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Agency Theory*, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai peranan penting untuk mengelola dana yang ada dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Selain itu, pendapatan daerah juga akan memperlihatkan bagaimana kinerja keuangan daerah. Dilihat dari seberapa besar realisasi anggaran yang dilaporkan setiap tahunnya dengan melihat pula dari bagaimana kinerja keuangan daerah atau keefektifan keuangan dan bagaimana pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Jika seluruhnya stabil dalam artian keuangan daerah sudah tergolong mandiri, efektif dan terus tumbuh maka disitulah menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat dipercaya oleh masyarakat salah satunya yaitu pelaku/penanggung jawab pajak, yang dapat mengolah dana untuk sarana dan prasarana daerah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hasnawati, 2019) yang menunjukkan keuangan daerah yang efektif dari tahun anggaran yang diteliti dan mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya, begitu juga pada penelitian ini juga menunjukkan keuangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang efektif dari tahun 2019-2021, namun tidak menunjukkan pertumbuhan yang positif atau meningkat secara terus-menerus.

## KESIMPULAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa anggaran disetiap tahunnya lebih besar nilainya dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah. Namun disamping itu, dari tahun 2019-2021 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dapat dikategorikan memiliki kemampuan keuangan yang lebih mandiri dikarenakan kurangnya penerimaan pendapatan hibah ataupun pendapatan dari pemerintah pusat. Hal tersebut dibuktikan dengan kecilnya nilai pendapatan hibah/transfe dari tahun 2019-2021.
2. Rasio kemandirian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019-2021 dalam kriteria tinggi dalam pola hubungan delegative yaitu kemampuan keuangannya lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan pendapatan hibah ataupun pendapatan dari pemerintah pusat dilihat dari tingkat kemampuan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak dan retribusi. Namun, dalam rasio efektivitas menunjukkan bahwa kondisi keuangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019-2021 cukup efektif. Hal tersebut disebabkan karena PAD tidak terealisasi sesuai dengan anggaran atau anggaran lebih besar dibandingkan realisasi. Selain itu, pada perhitungan rasio pertumbuhan masih dalam kategori rendah sekali karena dari 2019-2020 realisasi anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menurun dan meningkat kembali pada tahun 2021.

## SARAN

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) harus terus mengoptimalkan potensi pendapatannya yang telah ada agar pendapatan ditahun tahun berikutnya tidak lagi

mengalami penurunan dan melampaui target anggaran yang telah ditentukan untuk mencapai kategori pendapatan yang efektif. Alternatif atau cara yang memungkinkan dapat meningkatkan potensi daerah yaitu dengan mencari sumber pendapatan selain yang telah ada.

2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan semua rasio keuangan daerah agar lebih mendapatkan hasil yang maksimal dengan mengetahui pendapatan daerah hingga dengan belanja daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>
- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 72–88. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam>
- Faisal, A., Samben, R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis kinerja keuangan. *Kinerja*, 14(1), 6. <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i1.2444>
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48. <http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109>
- Fatin, L. A. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Pt . Ira Widya Utama Medan Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat*.
- Hariatih. (2022). Analisis Strategi pendapatan dan Pemasaran Hasil Tangkap Ikan Nelayan Tradisional Di Desa Lapakaka Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. *IMPREST : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 8–21. <https://doi.org/10.37476/imprest.v1i1.2972>
- Hasan, A., Mas, N., & Sopanah, A. (2022). Kinerja Keuangan Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan BUMN. *Owner*, 6(4), 3836–3847. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1201>
- Hasnawati. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Herawati, H. (2019). Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *Akuntansi Unihaz - JAZ*, 2(1), 16–25.
- Hidayah, S. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi*. 1–17. [http://eprints.unm.ac.id/13258/1/JURNAL SYAMSIDAR HIDAYAH B.pdf](http://eprints.unm.ac.id/13258/1/JURNAL%20SYAMSIDAR%20HIDAYAH%20B.pdf)
- Inayati, I. (2014). Bab ii kajian teori. *Bab Ii Kajian Teori*, 35(1), 16–72.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,

---

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>

Rahman, K. G. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Teknologi Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 198–209. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.216>

Sukmaningrum, T. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Semarang. *Skripsi Universitas Diponegoro*, 1–71.

Widiyanti, A., Kamal, B., & Aryanto. (2018). *Analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten tegal*. 1–6.